

Lho'Nga 15 April 1952.

No.180/5.

Perihal: Tentang pemberian tunjangan  
pejabat kepada para turunan  
raja2, pembesar2 negeri dan  
bangsawan, yang diasingkan  
oleh Pemerintah Hindia Be-  
landa.-

-----

Dengan hormat untuk memenuhi permintaan saudara yang  
bertanggal 27 Maret 1952 No.2381/5 maka dengan ini saya cha-  
berikan, sudah saja salidit dan menurut sebahu saja dibaha-  
gian saja tidak ada monev2 seperti dimaksud diperihal su-  
rat ini.

Sedemikianlah agar dengan ini saudara mendapat mak-  
lum.-

K e p a d a  
Jth. Bupati Kepala Daerah  
Kabupaten Atjeh Besar  
di  
Kutaraja.

41. Kepala Negeri Lho'Nga/Lp.



40  
Agms 100 / 5  
2/4-52

Kutaradja, 27 Maret 1952.

No. 2341/5


Lampiran : 3.-

Burat Gubernur Sumatera Utara Bahagian <sup>4</sup>otongan tanggal  
10- 5- 1952 no. 7065/2/12/2235/Kpsa/13 serta lampirannya.-

Hal-hal tersebut disampaikan dengan hormat kepada saudara:

1. Wedan Sabang di S a b a n g
  2. Wedan Seulism di Seulism
  3. Kepala Negeri Masjid Raya di Kutaradja
  4. Kepala Negeri <sup>4</sup>arussalam di Labaro Angan
  5. Kepala Negeri Ingin Djaja di Ulekatrang
  6. Kepala Negeri Darul Inarah di Lampansurat
  7. Kepala Negeri Kota Baru di Pekan Stauu
  8. Kepala Negeri Pekan Sada di Pekan Sada
  9. Kepala Negeri Lho'nga/Lumpang di Lho'nga
  10. Kepala Negeri Lhoang di L h o a n g.
- untuk diaktual dan dengan permintaan jang serupa.-

A. N. Bupati Kepala Daerah Kabupaten  
Atjan Besar  
Patin d/p.

  
O. Loebantoring.-



KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOGJA 30  
M E D A N.

Medan, 10 Maret 1952

No. 7065/2/12.  
2255/KPSU/13.

Lampiran : 3  
Perihal : Tentang pemberian tunjangan politik kepada para turunan raja-raja, pembesar-pembesar negeri dan bangsawan, yang disinghkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.-

Bersama ini disampaikan kepada saudara salinan surat Kementerian Dalam Negeri di Djakarta tanggal 11 Februari 1952 No.U.P.25 / 3 / 44 tentang hal sebagai yang dimaksud di kepala surat ini untuk ringkasan dipersiapkan membuat dengan perincian yang serupa dan mengirimkan keterangan yang diperlukan itu setcepat mungkin kepada saja.-

A.n. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA.  
Kepala Bahagian Keuangan,  
Untuk beliau  
Kepala Seksi U n u m  
d.t.o. O.S.K e m b a r e n.-

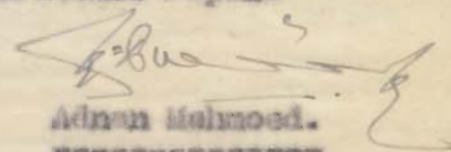
Untuk salinan yang serupa ;  
Djurutulis Kepala

Kepada:

1. Koordinator Pemerintahan Daerah Atjeh di Kutaredja.-
2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Utara.-

R E K A M A H :

1. Kepala Bahagian Urusan Pegawai Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan. (10)
2. Kepala Bahagian Pemerintahan Umum Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan ( 2 )
3. Kepala Bahagian Desentralisasi Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Utara., Seksi :
  1. Anggeran.II.Pembukuan.III.U n u m.-
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan.
6. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Sibolga.  
untuk di ketaksi-

  
Adnan Mahmood.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
----- D J A K A R T A -----

Kepada:

Sema G U B E R N U R . -

No.U.P. 23/3/44.- Tanggal : 11 Februari 1952. Lampiran : 2.

Perihal : Tentang pemberian tunjangan politik kepada  
para turunan radja2, pembesar2 negeri dan bang-  
wan, yang diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.-

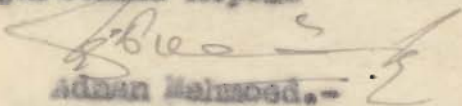
Bersama ini dikirimkan salinan dari surat kami (berikut lampirannya), ditunjukkan kepada Kepala Djawatan Perbandharaan dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan) di Djakarta tanggal 11 Februari 1952 no.U.P.23/3/46, tentang hal yang dimaksudkan dalam pokok surat itu, salinan mana dikirim pula kepada semua Kepala Kantor Pusat Perbandharaan dalam wilayah saudara.

Dengan merujuk untuk mempersingkat kepada bunji surat tersebut, diherap akan bantuan saudara supaya usahakan pengisian alat2 para turunan bekas radja2, bangsawan2 dan pembesar2 negeri, yang dipetjet dari martabatnja & q. diasingkan, ialah mereka yang pada tanggal 1 Maret 1942 masih menerima tunjangan politik dan sedj kapitulasi Djepang ts' pernah menerima tunjangan itu, & q. yang pambajaranja dihentikan.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Kepala Bagian Pegawai  
d.t.o. Suratno Bastrosidjojo.-

Untuk salinan serupu;  
Klerk Kepala  
d.t.o. Tengku Hasjin.-

Untuk salinan yang sama bunjinja;  
Djuritulis Kepala

  
Adnan Mahmood.-



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
-----D J A K A R T A-----

Kepada:

Kepala Djawatan Perbandharaan  
dan Kas2 Negeri (Kementerian Keuangan)  
di-----  
-Djakarta-

TEBUSAN dikirim kepada:

1. Semua Gubernur
  2. Semua Kantor2 Pusat Perbandharaan
- untuk d i m a k l u m i.-
- 
- 

No.U.P. 23/3/46.

Tanggal : 11 Februari 1952.

Lampiran : 1 tjento  
daftar.-

Perihal : Tentang pemberian tundjangan politik kepada  
para turunan radja2, pebesar2 negeri dan bangsawan2,  
jang diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.-  
-----

Dengan ini kami minta perhatian saudara buat hal terse-  
but dibawah ini.

Sebelum pendudukan oleh tentara Djepang dalam beberapa  
daerah di Indonesia terdapat turunan radja2, bangsawan2 dan pebe-  
sar2 negeri ("landsgrotten"), jang dahulu oleh Pemerintah Hindia  
Belanda dipatjet dari martebatnya dan diasingkan.

Kepada mereka itu ditundjuk sesuatu daerah atau tempat  
sebagai tempat kediaman dan kepada mereka diberikan tundjangan  
politik;

- a. selama terhadap mereka masih berlaku tindakan politik ;
- b. sepanjang mereka berada dalam keadaan ta'mampu ("beheftig")  
dan ta'dapat mentjari nafkah dengan djalan bekerdja, sesuai dengan  
keadaan peribadinya.

Diantara mereka itu sekarang sudah banyak jang telah me-  
ninggal dunia.

Kemudian dengan kembalinya di Indonesia Pemerintah Hin-  
dia Belanda pebejaraan tundjangan politik tersebut untuk sementa-  
ra waktu dilandjutkan, meskipun mereka ta'berada lagi didaerah jg  
dahulu ditundjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai tempat  
kediamannya.

Ketika itu oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan dia-  
dian dianggap, bahwa tindakan politik terhadap mereka telah diha-  
puskan.

Dengan memperlihatken surat putusan tentang tundjangan  
politik, maka kepada turunan2 itu, ketika mereka menghadap kepada  
instansi2 dibawah pengawasan Pemerintah Hindia Belanda, segera di-  
berikan tundjangan politik lagi.

Ketika itu tek diselidiki lagi :

- a. apakah tundjangan itu mungkin sebelum akhir tahun 1941 telah  
ditjabut c.q. dikurangi;
- b. apakah jang berkepentingan masih berada dalam keadaan tek maa-  
pu.

Semantara.....



Sementara itu oleh Kementerian kami ts' dapat diketahui lagi.

- a. jumlah banjaknja turunan tersebut;
- b. nama2nja, umur dan susunan keluarga2nja;
- c. apakah mereka masih bahak untuk menerima tundjangan.

Tak perlu kiranja ditjatat disini, bahwa beberapa diantara mereka khusus jang masih muda dan terpeladjar-telah bekerdja, baik pada Pemerintah sebagai pegawai negeri sipil c.q. militer.

Berhubung dengan hal2 tersebut, diatas kami bermaksud untuk menindjou lebih lanjut soal pemberian tundjangan politik kepada turunan radja2 x), bangsawan2 dan pembesar2 negeri, jang dahulu dipotja dari murtabatnja oleh Pemerintah Hindia Belanda dan diasingkan bersama dengan keluarga2nja serta pengikut2nja.

Untuk menjelenggarakan penindjauan ini, kami memerlukan daftar dari orang2 jang pada tanggal 1 Maret 1942 masih menerima tundjangan politik meskipun pembayarannja pada suatu waktu setelah bersahir perangsang dihentikan.

Untuk keperluan ini kami mengharap bantuan saudara agar supaya Kantor2 Pusat Perbendaharaan dibawah lingkungan keluasaan saudara mendaftarkan para turunan termaksud, ialah jang menerima bejangan dari Kantor2 tersebut, menurut tjonto terlampir ini, dan keadaan dikirim kepada kami.


Djika mungkin dapatlah kiranja dilampirkan pula salinan2 surat putusan, jang menjatakan hak mereka atas tundjangan tersebut.

Untuk melantjarkan penjelessiannja, maka kepada Kantor2 Pusat Perbendaharaan dikirim salinan (berikut lampirannja) dari surat ini, agar Kantor itu menjilapkan segala sesuatu berhubung dengan pendaftaran itu.

Kepada para Gubernur telah kami kirim pula salinan salinan dari surat ini (berikut lampirannja), dengan permintaan supaya diusahakan pentjetaan alamat2 para turunan2 radja2 dsb. itu dan didaftarkan menurut tjonto termaksud, ialah mereka jang pada tanggal 1 Maret 1942 sudah berhak atas tundjangan politik, akan tetapi serendjek kapitulasi Djepang, berhubung dengan suakawa keadaan, tidak c.q. belum masuk pembayaran Kantor2 Pusat Perbendaharaan.-

x) Menurut pedoman Pemerintah Hindia Belanda, maka ~~debut~~ ~~kedatulu~~ hanja dapat diberikan tundjangan politik kepada turunan sampai deradjet kedua; dalam hal sangat luar biasa dapat diberikan tundjangan politik sampai turunan deradjet ketiga.-

Untuk salinan jang serupa;  
Djurutulis Kepala

  
Adnan Mahmoed.-

A.n. Menteri Dalam Negeri  
Sekretaris Jenderal  
d.t.o. Mr. Soemarmoan.-

Untuk salinan jang serupa oleh:  
K l e r k Kepala  
d.t.o.  
Tengku Hasjim.-



Lampiran surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1952 no.U.P.23/3/46.-

yang telah menerima dengan poli tanggal	3.	3.	Tempat tinggal pada tgl. 1-3-1942.	Undjangan politik pa da tgl. 1 3-1942.	Tgl. dan no. surat putusan tentang pemberi-an tun-djangan.	Besar nja tunджа ngen politik seks-rang.	Tempat tinggal seke-fang.	Peker-djaan seka-rang.	Fang hasil dan ber-sih.	Keterangan tentang peng hidupanja ur tuk mentjari nafkah sendi ri dengan dja lan bekerdja.
	4.	4.								
	5.	5.								
	6.	6.								
	7.	7.								
	8.	8.								
	9.	9.								
	10.	10.								
	11.	11.								
	12.	12.								

Lampiran surat Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 1952 no.U.P.23/3/46.-

No. urut.	Nama orang yang berhak menerima tondjangan politik dan tanggal lahir.	Susunan keluaran-nya.	asal dari.	Tempat tinggal pada tgl. 1-3-1942.	Tondjangan politik pada tgl. 1-3-1942.	Tgl. dan no. surat putusan tentang pemberian tondjangan.	Besarnya tondjangan politik seks-rang.	Tempat tinggal seks-rang.	Pekerjaan seks-rang.	Fungsi dan jabatan.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.